

Bangunan Heritage Tingkatkan Daya Tarik Usaha

YOGYA (KR) - Bangunan heritage tidak semata sebagai warisan budaya, namun dapat menjadi daya tarik masyarakat, bahkan jadi 'magnet' sebuah usaha jika dioptimalkan keberadaannya. "Bangunan di PT Taru Martani ini 100 persen bangunan heritage. Kami tidak perlu bingung soal biaya perawatan. Selain menjadi tempat produksi cerutu juga, bangunan ini menjadi bagian dari daya tarik Taru Martani Coffee & Resto 1918," ujar Direktur PT Taru Martani, Drs Nur Achmad Affandi MBA dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Yuniarto Dwi Sutono bersama Paguyubuan Pedagang Zona Kuliner Pasar Pasty di ruang Direksi PT Taru Martani, Rabu (5/1). Kehadiran para pedagang Zona Kuliner Pasar Pasty dalam pertemuan tersebut, untuk studi banding serta berharap mendapat masukan untuk kebangkitan zona tersebut ke



Nur Achmad Affandi memberikan penjelasan mengenai kinerja PT Taru Martani dan Taru Martani Coffee kepada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dan para pedagang Zona Kuliner Pasty Yogyakarta.

depan. Zona kuliner sebagai bagian dari penunjang kunjungan wisata dengan melihat kesuksesan pengelolaan Taru Martani Coffee. Mereka hadir dengan didampingi jajaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Ikut mendampingi Yuniarto, Kepala Bidang Pasar Rakyat Gunawan

Nugroho Utomo, Kepala UPT Pasty Agus Purnomo dan Bakoh Tupon Langkir Hadi serta Fajar Agung. Tak dapat dipungkiri, kata Nur Achmad, terjadi saling mendukung antara keberadaan bangunan heritage dengan berkembangnya Taru Martani Coffee. Dengan penambahan

tulisan nama perusahaan dan tahun berdirinya bangunan, yakni 1918 menguatkan identitas perusahaan dan bangunan. Sehingga menjadi spot menarik untuk foto para pengunjung cafe, maupun pengunjung pabrik cerutu tertua. Sehingga ketika mengunjungi Coffee, tidak puas jika belum foto dengan latar belakang bangunan heritage.

Meski demikian, mantan Ketua Kadin DIY, satu faktor yang menentukan adalah pelayanan yang lebih dari standar. Baik dari rasa, higienis hingga harga yang terjangkau.

Dalam kesempatan itu, Nur Achmad yang didampingi Deputi Pemasaran, Slamet dan Manager Taru Martani Coffee, Andi banyak memberikan masukan. Selain strategi layanan konsumen hingga persoalan tata letak bangunan dan panggung. Disamping pentingnya menjaga standar mutu dan mengurangi komplain pengunjung. (Jon)-f

PEMDA DIY MINTA PROKES DIPRIORITASKAN Beri Lampu Hijau PTM Penuh di Kampus

YOGYA (KR) - Pemda DIY memberi lampu hijau kepada Perguruan Tinggi (PT) untuk mengadakan perkuliahan atau pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh. Kendati demikian, pengelola kampus tidak boleh memaksakan diri untuk mengadakan PTM secara penuh jika fasilitas yang dimiliki belum memungkinkan. Terutama yang berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan (prokes) yang harus menjadi prioritas.

"Pemda DIY telah berkoordinasi dengan sejumlah PT terkait wacana kuliah luring 100 persen pada semester ganjil. Keputusan terkait kuliah tatap muka diserahkan kepada masing-masing kampus sesuai kesiapan sarana dan prasarana maupun kemampuan yang dimiliki. Jadi tergantung masing-masing PT baik dari segi sarana dan prasarana maupun kesiapan dari proses perkuliahan," kata Sekda DIY K Baskara Aji di kantornya, Rabu (5/1).

Baskara Aji mengungkapkan, secara prinsip pihaknya mendukung jika ada PT yang mau melaksanakan PTM secara penuh. Lewat PTM diharapkan kualitas perkuliahan mahasiswa bisa lebih terjaga. Karena untuk mata kuliah tertentu ada yang tidak bisa dilakukan secara daring, tapi perlu dilakukan di laboratorium atau tempat lain. Konsekuensinya, kampus harus bisa menjamin penegakan prokes saat PTM. "Kami bisa memahami jika tidak semua kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring," ungkapnya. (Ria)-d

Pemerintah

mengalokasikan untuk minyak goreng kemasan sederhana ini untuk bisa jalan," ujarnya.

Ia menargetkan distribusi minyak goreng tersebut akan dapat menjangkau seluruh pasar yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan pada akhir minggu depan. "Mudah-mudahan ini dapat memberikan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat dan mudah-mudahan bisa memberikan nilai tambah

kepada masyarakat dan nilai aman karena bentuk daripada penyaluran minyak goreng ini minyak goreng kemasan sederhana," kata Lutfi.

Kendati menyediakan minyak goreng kemasan sederhana, Lutfi menegaskan, pihaknya masih akan tetap mempertahankan minyak goreng kemasan premium.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Eddy Abdurrachman menyampaikan, pihaknya ditugasi untuk menutup selisih harga antara harga pasar dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. "Dengan dana kurang lebih Rp 3,6 triliun termasuk PPN, perlu saya informasikan bahwa Alhamdulillah kondisi dana dari BPDPKS untuk bisa mendanai program ini Insya Allah bisa dilakukan yang sampai dengan 6 bulan," katanya. (Ant/Sim/Lmg/San)-d

Sambungan hal 1

Kementerian

Bintang juga menyampaikan, sejauh ini Pemerintah telah berkomitmen untuk bersama-sama DPR membahas RUU TPKS, agar harapan masyarakat terhadap lahirnya regulasi yang secara khusus mengatur sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang komprehensif dan berperspektif korban dapat segera disahkan. "Pemerintah mengharapkan proses penetapan RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR dapat dilakukan pada masa persidangan awal 2022," ujarnya.

Sambungan hal 1

RUU TPKS merupakan terobosan hukum sebagai payung hukum yang komprehensif untuk mengatasi kekerasan seksual yang sistemik, khususnya terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban. Kementerian PPPA berharap semua pihak mengedepankan kemanusiaan dalam memperjuangkan RUU TPKS. Saat ini yang menjadi utama dan prioritas adalah kepentingan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. (Sim)-d

Pasar

"Saya titip jaga kebersihannya, jaga keamanannya, sehingga pasar ini betul-betul jadi pasar yang bersih, rapi, tertata, dan tidak menjadi pasar yang kotor dan berbau," ujar Jokowi.

Selama kunjungannya di Pasar Johar, warga dan pedagang antusias dan meminta foto selfie. Bukan hanya kepada Presiden Jokowi, warga juga berteriak memanggil nama Gubernur Ganjar Pranowo. Ganjar yang awalnya hanya diam men-

dampingi Presiden, tiba-tiba "dikeroyok" warga dan pedagang yang berada di lokasi. Mereka berteriak memanggil nama Ganjar untuk meminta selfie. Kontan, Ganjar langsung menenangkan warga. Namun, ia tetap melayani permintaan foto Bersama, sehingga sempat ketinggalan Presiden.

Di hari yang sama, Jokowi juga meresmikan Bendungan Randugunting Kecamatan Japah Blora, Jateng. Bendungan

seluas 187 hektare dan bisa menampung air sebanyak 14,42 juta meter kubik tersebut dibangun menggunakan APBN tahun 2018-2022, dengan nilai kontrak Rp 880 miliar dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Tbk. Bendungan Randugunting ini merupakan Bendungan yang ke-14 diresmikan di tahun 2021 dari total 61 bendungan yang akan dibangun sampai 2024 mendatang.

Sambungan hal 1

(Bdi/Cha/Tas)-f

Masyarakat

menaikkan rating konten di laman yang memuatnya.

"Saya kira saat ini masyarakat sudah semakin cerdas, termasuk dengan pemberian model seperti itu. Jadi orang yang membaca tidak akan percaya begitu saja," kata Sekda di Kepatihan, Rabu (5/1).

Baskara Aji mengatakan, sejauh ini belum ada dampak terkait hal tersebut. Namun jika ke depan ada hal yang

merugikan terkait penjualan virtual tersebut maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

Kepala Bagian Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji melalui keterangan resminya di Yogyakarta menegaskan Pemda DIY tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas jual beli lahan virtual di DIY melalui situs Next Earth. (Ria/Ant)-d

Sambungan hal 1

MBKMnomics

Di DIY terdapat sejumlah PTN/PTS (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi) - sekitar 120 PTN/PTS - dengan berbagai macam fakultas dan program studi (prodi). Seluruh PTN/PTS tersebut mempunyai dosen (Guru Besar, Doktor dan Magister) yang kompeten serta mahasiswa dari berbagai prodi. Jika nantinya seluruh PTN/PTS sudah menerapkan Program MBKM, khususnya Program Magang, maka dapat menjadi potensi yang sangat besar untuk dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi sekaligus menggerakkan perekonomian DIY.

Program Magang MBKM nantinya tidak hanya diterapkan di perusahaan, lembaga pemerintah dan swasta, serta lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) namun juga aktivitas yang lain yang berkembang di masyarakat. Bentuk program magang tersebut juga dapat diterapkan dalam: (1) Kegiatan Desa dan Kampung Wisata. (2) Kegiatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). (3) Kegiatan BUMDes. (4) Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan/Desa. (5) Kegiatan Desa/Kelurahan Mandiri Budaya. (6) Kegiatan Kelompok Petani, Peternak dan Nelayan. (7) Kegiatan Sentra Industri. (8) Kegiatan Kelompok UMKM. (9) Kegiatan Koperasi. (10) Kegiatan LSM/Asosiasi Profesi/Asosiasi Pengusaha dan sejenisnya.

Berdasarkan kondisi di atas, maka sebenarnya PTN/PTS dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Mulai Pemda DIY/Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Forum CSR

DIY, Lembaga Layanan Dikti V, BI DIY, OJK DIY, KADIN DIY dan Asosiasi Profesi misalnya ISEI/IAI/PII/IDI dan sebagainya. Untuk mewujudkan dan menyelenggarakan model Program Magang 'MBKM DIY Flagship' atau apapun namanya.

Seluruh kegiatan dari aktivitas yang telah disebutkan dapat 'diintervensi' oleh Program Magang 'MBKM DIY Flagship' dari seluruh prodi di PTN/PTS. Bentuk atau wujud nyata Program Magang tersebut adalah pendampingan dan jika diperlukan ditambah dengan pelatihan/lokakarya.

Dalam program tersebut diharapkan dapat terjadi saling *transfer of knowledge* antara mahasiswa dengan pelaku dan pengelola usaha, petani, peternak, nelayan, perangkat desa/keurahan dan pengurus LSM/asosiasi.

Sebagai contoh, melalui program magang tersebut Desa Wisata/Kampung Wisata di DIY dapat dikembangkan. Mulai oleh dosen dan mahasiswa dari Prodi Pariwisata, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Teknik Informatika. Juga Prodi Hukum, Komunikasi, Pertanian, Arsitektur, Teknik Sipil, Kesehatan Masyarakat dan sebagainya. Dosen, mahasiswa, pengelola dan masyarakat terlibat mencari solusi untuk mengembangkan serta memecahkan masalah yang dihadapi Desa/Kampung Wisata.

Output dari program magang tersebut diharapkan berupa program kerja jangka pendek dan jangka menengah bagi Desa/Kampung tersebut. Mahasiswa dengan pembimbingan dosen harus menyusun laporan/karya ilmiah yang pada berisi kajian teori/konseptual, potensi, masalah dan rekomendasi program kerja. Laporan tersebut tidak hanya diberikan kepada pengelola desa/kampung wisata namun juga kepada pemangku kepentingan. Di samping itu, laporan tersebut juga disusun menjadi artikel yang dapat diterbitkan di jurnal ilmiah.

PTN/PTS juga dapat mulai mewujudkan Program Magang 'MBKM DIY Flagship'. Langkah awal dapat dimulai dari Pimpinan PTN/PTS berkoordinasi untuk menyusun juklak dan juknis pelaksanaan Program Magang 'MBKM DIY Flagship'. Selanjutnya program magang tersebut dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan agar dapat disinergikan dan dikolaborasi dengan program kerja mereka.

Mewujudkan Program Magang 'MBKM DIY Flagship' sebagai akselerator pemulihan ekonomi dan pengerak perekonomian memang tidak mudah. Namun bukan sekadar impian.

(Penulis, Dosen FBE UAJY, Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta, Pengurus Pusat ISEI dan Pengurus Kadin DIY)-d

Sambungan hal 1

Kemendagri

Sementara itu menurutnya, untuk Pj Bupati dan Walikota diajukan Gubernur dan dipilih Kemendagri. "Setiap Pj Gubernur yang akan mengisi kekosongan jabatan itu, menjelang berlangsungnya Pilkada 2024 akan dipilih langsung Presiden berdasarkan pengajuan nama dari Kemendagri. Sedangkan untuk Pj Bupati dan Walikota dipilih langsung Kemendagri," ujarnya.

Ia meminta sebaiknya partai politik yang bermiat mengusulkan calon Pj kepala daerah dalam mengisi kekosongan jabatan, mengurungkan niat tersebut. Hal itu, karena ber-

tentangan dengan aturan perundang-undangan.

Junimart berharap dengan proses penunjukan Pj kepala daerah sesuai aturan, maka calon yang terpilih dapat menjalankan seluruh program strategis pemerintahan. "Program-program strategis di pemerintahan provinsi dan kabupaten, Kota tetap berjalan dengan kehadiran para Penjabat (Pj) itu sebagaimana fungsi dan tugas Gubernur yang sudah berakhir masa jabatannya sesuai asas pemerintahan yang baik," katanya. (Ant)-d

Sambungan hal 1

Digagalkan

Bakti juga membenarkan jika ganja tersebut, rencananya akan digunakan untuk pesta saat pergantian tahun baru 2022. "Modus jaringan ini, yakni dengan menawarkan saat mereka kumpul-kumpul di komunitas tertentu. Motifnya ekonomi, yakni mendapatkan keuntungan dan memang ini sangat menggiurkan karena bisa mendapatkan hasil penjualan hingga 400 kali lipat dari pembelian," tandasnya.

Kasubdit 2 Ditresnarkoba AKBP Erma Wijayanti yang memimpin langsung pengungkapan kasus itu menjelaskan, saat ini pihaknya masih memburu jaringan yang ada di atasnya. Terungkapnya kasus itu, diawali penangkapan terhadap tiga tersangka yakni RD, DD dan BM di sebuah rumah kos kawasan Caturtunggal Depok Sleman,



Desember 2021. Dari rumah kos tersebut, disita ganja seberat 5,6 kilogram.

"Dari keterangan RD, ganja itu didapatkan dari penjual yakni Mr X (DPO), awal Desember 2021. Saat itu RD memesan 10 kilogram seharga Rp 13,5 juta, namun baru akan dibayarkan jika barang sudah laku. Barang itu diambil sendiri dan dibawa oleh RD menggunakan tas ransel dari rumah Mr X," ungkap Erma.

Dian diedarkan RD ke Bandung dan Yogya. Dari penangkapan ketiga tersangka, polisi juga menangkap dua pelaku lainnya yakni MA dan AS dengan barang bukti total 7,573 kilogram ganja. "Para tersangka ini selain mengedarkan juga mengonsumsi barang haram tersebut. Jaringan ini masih kami kembangkan karena sudah ada beberapa nama yang masih kita buru," pungkask polwan berparas cantik tersebut. (Ayu)-f

(Ayu)-f

Dompet

Sambungan hal 1	
53 Paguyuban Keluarga Kristiani LL Dikti Wil V Yogyakarta....	9,000,000.00
54 Paguyuban Pasar (Ps. Beringharjo, Ps.Sentul dan Ps. Gedongkuning)	37,270,000.00
55 Ibu Purwadi	000,000.00
JUMLAH	Rp 58,836,500.00
s/d 03 Januari 2022	Rp 255,413,200.00
s/d 04 Januari 2022	Rp 314,249,700.00
Tiga ratus empat belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)	

Ralat penulisan edisi rabu Tgl. 5 Januari '22 tertulis Alumni SMEA Gowongan Kidul Th.1980 Rp. 000.000, yang benar Alumni SMEA Gowongan Kidul Th.1980 Rp. 2.000.000.



Alfriadi Dwi Atmoko, SE, MSi, Ak, CA
Dosen Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta

HALO p e m b a c a Kedaulatan Rakyat yang inspiratif, kali ini saya akan

Perkembangan E-Money Di Indonesia

membahas salah satu teknologi pada industri finansial teknologi. Finansial teknologi di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dimulai sejak tahun 2009 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/12/PBI/2009 tepatnya pada tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (e-money), maka pada mulai tanggal 13 April 2009 secara sah peraturan ini mengatur mengenai e-money dan terpisah dengan peraturan mengenai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. PBI ini mengatur tata cara perizinan dan

peralihan perizinan, tata cara penyelenggaraan, pengawasan, peningkatan keamanan teknologi dan sanksi. Perkembangan e-money semakin tinggi setelah diterbitkan PBI ini. Diawali dari inovasi oleh Bank BCA yang mengeluarkan Flazz BCA pada tahun 2007 dan merupakan lembaga keuangan pertama kali yang menyediakan e-money untuk bertransaksi sehingga Bank BCA menjadi lembaga keuangan tertua dan pionir e-money di Indonesia yang bertahan sampai sekarang. Penggunaan e-money terus mengalami peningkatan seiring perkembangan teknologi di

dunia. Pada tahun 2014 Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martoeardjo membuat sebuah gerakan yaitu "Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)" pada tanggal 14 Agustus 2014 bertempat di Jakarta. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat dalam penggunaan instrumen keuangan non kas (cashless) dalam bertransaksi atas kegiatan ekonomi. Gerakan ini tentu saja mendukung penuh masyarakat untuk bertransaksi menggunakan e-money. Pada e-money difasilitasi berbagai fitur pembayaran

kepada berbagai layanan sehingga mempermudah dan mempercepat transaksi dengan memangkas syarat administrasi yang mengharuskan datang secara langsung kepada penyedia layanan tersebut. Sebagai contoh untuk membayar listrik, para pelanggan tidak perlu datang langsung ke kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) namun cukup dengan berbagai layanan e-money semua dapat dibayarkan dari manapun dan kapanpun sebelum waktu jatuh tempo pembayaran berakhir. Tidak hanya sebagai alat transaksi saja, namun penyedia jasa e-money sudah semakin ber-

kembang dengan berbagai fitur inovasi seperti untuk berinvestasi, beramal, berdonasi dan lain sebagainya sehingga sangat membantu masyarakat dalam bertransaksi. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh e-money di Indonesia terus meningkat dibuktikan dengan volume transaksi dan nominal e-money yang diterbitkan oleh Statistik Sistem Pembayaran (SSP) (2021) Bank Indonesia (BI) pada tahun 2012-2020 yaitu volume transaksi dan nominal e-money dari tahun 2012 sampai 2020 terus meningkat walaupun pada tahun 2020 terdapat penurunan volume transaksi



namun untuk nominal e-money justru mengalami peningkatan sebesar Rp 59.743.720,4 (juta) atau sebesar 29%.

Kepercayaan masyarakat dalam menggunakan e-money di Indonesia merupakan kunci peningkatan volume transaksi dan nominal e-money yang semakin meningkat. Berbagai fitur penguaduan layanan konsumen juga sudah ada dalam beberapa platform e-money sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi dalam menggunakan aplikasi e-money.***